



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3866120,
FAKSIMILE (021) 3866120; laman www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : UND-46/PK.6/2025 17 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Badan/Dinas Pendapatan Daerah
2. Kepala Badan/Dinas Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) bekerja sama dengan LPEM FEB Universitas Indonesia, LPER FEB Universitas Andalas, PK2ND FEB Universitas Brawijaya, PPKED FEB Universitas Hasanuddin, dan P3KD FEB Universitas Sam Ratulangi, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah TA 2025 yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) selama 3 (tiga) hari dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kelas	Center Penyelenggara	Jam Pelatihan	Kuota Peserta
Bimtek Triwulan 2, tanggal 6-8 Mei 2025				
1.	Penggalian Potensi PDRD	LPEM FEB UI	18 Jam	35 orang x 1 kelas
2.	Penggalian Potensi PDRD	LPER FEB UNAND	18 Jam	35 orang x 1 kelas
3.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	PK2ND FEB UB	18 Jam	35 orang x 1 kelas
4.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	PPKED FEB UNHAS	18 Jam	35 orang x 1 kelas
5.	Pemeriksaan Pajak Daerah	P3KD FEB UNSRAT	18 Jam	35 orang x 1 kelas
Bimtek Triwulan 3, tanggal 7-9 Juli 2025				
1.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	LPEM FEB UI	18 Jam	35 orang x 1 kelas
2.	Penagihan Pajak Daerah	PPKED FEB UNHAS	18 Jam	35 orang x 1 kelas

Bimtek bidang Keuangan Daerah terbuka umum, namun untuk bidang Perpajakan Daerah (Pemeriksaan Pajak Daerah, Penggalian Potensi PDRD, dan Penagihan Pajak Daerah) diprioritaskan bagi pemda peserta Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Potensi Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemda, utamanya pada pemda yang belum pernah mengikuti bimtek dimaksud.

Mengingat kuota yang terbatas, mohon bantuan Saudara/i kiranya dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk mengikuti bimtek dimaksud. Pendaftaran Bimtek Triwulan 2 dibuka sampai dengan tanggal 25 April 2025, sedangkan pendaftaran Bimtek Triwulan 3 dibuka mulai tanggal 16 Juni s.d 23 Juni 2025.

Calon peserta diharapkan segera melakukan pendaftaran melalui tautan: https://linktr.ee/Form_Pendaftaran_Bimtek_2025. Calon peserta yang memenuhi ketentuan akan segera diumumkan sebagai peserta definitif. Guna mendukung pencapaian pembelajaran yang optimal, mohon peserta dapat dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek. Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan Bimtek dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat elektronik (*e-sertifikat*).

Adapun persyaratan peserta dan informasi lainnya tercantum dalam lampiran undangan ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung yang tertera dalam lampiran undangan ini. Sebagai informasi, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek ini dibebankan pada DIPA DJPK tahun anggaran 2025.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi selaku center penyelenggara bimtek



Ketentuan Umum
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Triwulan 2 dan 3 Tahun 2025

I. Jadwal Pelaksanaan Bimtek

No.	Kelas	Center Penyelenggara	Jam Pelatihan	Kuota Peserta
Bimtek Triwulan 2, tanggal 6-8 Mei 2025				
1.	Penggalian Potensi PDRD	LPEM FEB UI	18 Jam	35 orang x 1 kelas
2.	Penggalian Potensi PDRD	LPER FEB UNAND	18 Jam	35 orang x 1 kelas
3.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	PK2ND FEB UB	18 Jam	35 orang x 1 kelas
1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	PPKED FEB UNHAS	18 Jam	35 orang x 1 kelas
2.	Pemeriksaan Pajak Daerah	P3KD FEB UNSRAT	18 Jam	35 orang x 1 kelas
Bimtek Triwulan 3, tanggal 7-9 Juli 2025				
1.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	LPEM FEB UI	18 Jam	35 orang x 1 kelas
2.	Penagihan Pajak Daerah	PPKED FEB UNHAS	18 Jam	35 orang x 1 kelas

Bimtek dilaksanakan selama 3 hari kerja dengan total jam pelatihan sebanyak 18 jam sesuai jadwal yang disiapkan oleh masing-masing center.

II. Persyaratan Peserta

1. Calon peserta yang diutamakan mendaftar adalah aparatur pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pilihan kelas.
2. Peserta bimtek perpajakan daerah diprioritaskan dari Pemda yang mengikuti program Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Pemda, DJP dan DJPK.
3. Peserta Bimtek berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian bimtek sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta harus dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek.
5. Belum pernah mengikuti kelas yang sama pada Bimtek yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Peserta adalah ASN yang berstatus PNS dan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda/ golongan II/a.
7. Peserta mendapatkan penugasan dari Pimpinan Instansi masing-masing dengan melampirkan Surat Pelaksanaan Tugas (SPT).
8. Peserta menggunakan laptop atau komputer yang terhubung dengan internet serta dapat mengaktifkan video camera.

III. Ketentuan Peserta Bimtek

1. Setiap Pemda dapat mengirimkan peserta sebanyak 1 (satu) orang.
2. Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan https://linktr.ee/Form_Pendaftaran_Bimtek_2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satu email (gmail) hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan satu orang.
 - b. Pendaftar diharuskan mengunggah/melampirkan foto atau scan Formulir Persetujuan Atasan pada halaman pendaftaran daring.
 - c. Batas waktu pendaftaran peserta Bimtek Triwulan 2 paling lambat tanggal 25 April 2025 dan untuk Bimtek Triwulan 3 paling lambat tanggal 23 Juni 2025.
3. Tautan pendaftaran akan ditutup oleh panitia apabila kuota peserta setiap kelas sudah terpenuhi.
4. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti bimtek adalah peserta yang telah lolos proses verifikasi oleh panitia dan ditetapkan dalam daftar peserta definitif oleh Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
5. Daftar peserta definitif akan diumumkan paling lambat 5 hari setelah pendaftaran ditutup.
6. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dimasukkan ke dalam *Whatsapp Group* bimtek masing-masing kelas.
7. Untuk kepentingan administrasi dan pemberian sertifikat pelatihan, seluruh peserta wajib menyampaikan Surat Tugas mengikuti Bimtek dari pimpinan instansi masing-masing kepada panitia melalui link yang akan diinfokan selanjutnya.
8. Peserta yang dinyatakan lulus Bimtek akan memperoleh Sertifikat dengan ketentuan:
 - a. Menyelesaikan seluruh tahapan bimtek minimal memenuhi 95% jamlat.
 - b. Mengerjakan pre test dan post test, serta mengisi form evaluasi pengajar dan materi kelas setiap hari, serta form evaluasi penyelenggaraan bimtek pada hari terakhir.
 - c. Peserta dinyatakan lulus apabila memperoleh hasil post test minimal mencapai nilai 70 (skala 100).
 - d. Sertifikat dalam bentuk elektronik (e-sertifikat) ditandatangani oleh Pimpinan center dan DJPK yang akan diberikan paling lambat 7 hari kerja setelah Bimtek selesai.
9. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi para narahubung:
 - a. Sdr. M. Nur Setiawan (08158250252)
 - b. Sdr. Sastrodirjo (081219962240)
 - c. Sdri. Mahaini (085742724175)

IV. Biaya

1. Peserta Bimtek tidak dipungut biaya (gratis).
2. Biaya penyelenggaraan Bimtek dibebankan pada DIPA DJPK Kemenkeu TA 2024.

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



Formulir Persetujuan Atasan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nomor Whatsapp :

Menyatakan setuju dan berkomitmen mendukung keikutsertaan pejabat/pegawai di bawah ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Keuangan Daerah tahun 2025 secara daring (*online*)

Nama :

Jabatan :

Status : PNS / CPNS *)Coret yang tidak perlu

Instansi :

Kab/Kota :

Nomor Whatsapp :

Kelas Bimtek :

PTN (Center) : UI / UB / UNAND / UNHAS / UNSRAT *)Coret yang tidak perlu

Tanggal Bimtek :

..... 2025
Pejabat yang menugaskan,

.....

Catatan:

1. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan:
https://linktr.ee/Form_Pendaftaran_Bimtek_2025
2. Formulir Persetujuan Atasan ini diupload pada saat pendaftaran
3. Peserta tidak dikenakan biaya.

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Bimtek keuda kelas pengelolaan barang milik daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik pengelolaan aset daerah yang berlaku.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan aset daerah memiliki peranan yang penting sebagai upaya untuk menggerakkan orang dan mengoptimalkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama guna mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Memperhatikan kondisi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah, terutama di bidang penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.
MODEL PEMBELAJARAN	
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NON TATAP MUKA (NTM) ☐ e-learning ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah, peserta diharapkan mampu: - Memahami Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah - Memahami Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran - Memahami Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	

4. Memahami Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
5. Memahami Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah
6. Memahami Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah

KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1.1 memahami regulasi barang milik daerah
 - 1.2 memahami siklus pengelolaan barang milik daerah (menjelaskan secara umum perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah)
 - 1.3 memahami pejabat pengelolaan barang milik daerah
2. Memahami Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran
 - 2.1. memahami ketentuan umum perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan penganggaran
 - 2.2. memahami perencanaan pengadaan barang milik daerah
 - 2.3. memahami perencanaan pemeliharaan barang milik daerah
 - 2.4. memahami perencanaan pemanfaatan barang milik daerah
 - 2.5. memahami perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
 - 2.6. memahami perencanaan penghapusan barang milik daerah
3. Memahami Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik daerah
 - 3.1. memahami prinsip umum penggunaan barang milik daerah
 - 3.2. memahami prosedur penggunaan barang milik daerah
 - 3.3. memahami prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah
 - 3.4. memahami bentuk-bentuk dan prosedur pemanfaatan barang milik daerah
4. Memahami Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
 - 4.1. memahami prinsip umum pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
 - 4.2. memahami tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
 - 4.3. memahami tuntutan ganti kerugian (TGR)
5. Memahami Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah
 - 5.1. memahami prinsip umum dan tata cara pemindahtanganan barang milik daerah
 - 5.2. memahami prinsip umum dan tata cara pemusnahan barang milik daerah
 - 5.3. memahami prinsip umum dan tata cara penghapusan barang milik daerah
6. Memahami Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
 - 6.1. memahami ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah
 - 6.2. memahami akuntansi barang milik daerah
 - 6.3. memahami prinsip umum dan tata cara pembukuan barang milik daerah
 - 6.4. memahami prinsip umum dan tata cara inventarisasi barang milik daerah
 - 6.5. memahami prinsip umum dan tata cara pelaporan barang milik daerah
 - 6.6. memahami penggunaan aplikasi untuk penatausahaan barang milik daerah

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
-----	----------	-------------	---------------	----------------

1.	Materi pokok	1.Manajemen Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	1
		2.Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran	3	2
		3.Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	3
		4.Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)	3	5
		5.Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3	4
		6.Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	3	6
2.	Materi penunjang	-	-	-
3.	Ceramah	-	-	-
4.	Observasi	-	-	-
5.	Pengarahan program	-	-	-
6.	Action Learning	-	-	-
TOTAL JP			18 JP	
LAMA WAKTU UJIAN Pre Test : 30 Menit Post Test : 30 Menit				
DILAKSANAKAN DALAM			3 hari	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM				
Bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
PERSYARATAN PESERTA				
Administrasi				
1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan dan aset daerah				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah dalam dua tahun terakhir atau pernah mengikuti e-learning penatausahaan dan pengelolaan aset daerah				
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek.				
Kompetensi				
1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek				
2. Memahami tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang milik daerah				
3. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet				
KUALIFIKASI PENGAJAR				
1. Kualifikasi Umum				
a. Profesional/praktisi di bidangnya				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				

2. Kualifikasi Khusus

- a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan
- b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Coaching of Coaches*

REKOMENDASI PENGAJAR

No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Manajemen Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Akademisi
2	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran	Akademisi
3	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Akademisi/Praktisi
4	Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)	Akademisi
5	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Akademisi
6	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Akademisi/Praktisi

Catatan:

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

BENTUK EVALUASI

Evaluasi Level 1

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website *e-learning* DJPK maupun link khusus.

Evaluasi Level 2

Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek

Evaluasi Level 3

Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.

Evaluasi Level 4

-

FASILITAS

1. Ruang pembelajaran daring melalui *MS Teams*
2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM Bimtek keuangan daerah kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, dan keterampilan dasar dalam bidang pembiayaan pembangunan daerah yang antara lain terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI Pembiayaan Utang Daerah yang merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan daerah, merupakan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, melalui penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Mencermati perkembangan <i>creative financing</i> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pemahaman dan peningkatan kapasitas ASN Pemda melalui kegiatan bimbingan teknis keuangan daerah yang diselenggarakan secara daring kelas Pembiayaan pembangunan daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan maupun penyusun anggaran daerah dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel melalui pembiayaan daerah.
	SASARAN (TARGET LEARNERS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
	MODEL PEMBELAJARAN
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NON TATAP MUKA (NTM) ☐ <i>e-learning</i> ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang
	STANDAR KOMPETENSI Setelah mengikuti bimtek keuda kelas pembiayaan pembangunan daerah, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD 2. Memahami Pinjaman Daerah 3. Memahami Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya

4. Memahami Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah
5. Memahami Manajemen Pengelolaan Utang

KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD
 - 1.1. Memahami kebijakan fiskal, *counter cyclical*, dan kesinambungan fiskal
 - 1.2. Memahami struktur APBD dan anggaran surplus/defisit
 - 1.3. Memahami kebutuhan pembiayaan: layanan publik dan pembangunan infrastruktur
 - 1.4. Memahami sumber-sumber pembiayaan
 - 1.5. Memahami sinergi pendanaan
 - 1.6. Memahami kebijakan perencanaan pembiayaan daerah
2. Memahami Pinjaman Daerah
 - 2.1. Memahami prinsip umum dan jenis pinjaman daerah
 - 2.2. Memahami batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah
 - 2.3. Memahami persyaratan umum pinjaman daerah
 - 2.4. Memahami prosedur pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan selain pemerintah
 - 2.5. Memahami konsep perhitungan: analisis kemampuan meminjam (DSCR, batas maksimum pinjaman dan pinjaman yang diperbolehkan)
3. Memahami Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya
 - 3.1. Memahami pengertian obligasi dan sukuk daerah
 - 3.2. Memahami tipe sekuritas yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah
 - 3.3. Memahami landasan teori obligasi dan obligasi daerah
 - a. Prinsip dasar obligasi (*Bonds*)
 - b. Pokok-pokok yang harus dipahami dalam *Bonds*
 - c. Penilaian Obligasi
 - d. Karakteristik utama obligasi daerah
 - e. Perencanaan *Supply* dan *Demand*
 - 3.4. Memahami prosedur penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah
 - 3.5. Memahami pembayaran kembali obligasi daerah dan sukuk daerah
 - 3.6. Memahami konsep perhitungan: analisis penilaian obligasi daerah dan sukuk daerah (penentuan harga, tingkat resiko dan tingkat keuntungan)
4. Memahami Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah
 - 4.1. Memahami maksud dan tujuan investasi pemerintah
 - 4.2. Memahami analisis kelayakan proyek
 - 4.3. Memahami sumber pendanaan yang tepat
 - 4.4. Memahami *best practice* proyek yang dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
5. Memahami Manajemen Pengelolaan Utang
 - 5.1. Memahami penguatan kelembagaan
 - 5.2. Memahami manajemen resiko
 - 5.3. Memahami metode dan tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan utang
 - 5.4. Memahami inovasi-inovasi pembiayaan (*Land Value Captured, Corporate Social Responsibility*)

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
-----	----------	-------------	---------------	----------------

1	Materi pokok	1. Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD	2	1
		2. Pinjaman Daerah	4	2
		3. Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya	4	3
		4. Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah	3	4
		5. Manajemen Pengelolaan Utang	3	5
2	Materi penunjang	-	-	-
3	Ceramah	Current issue / knowledge sharing	2	
4	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5	Observasi	-	-	-
6	Pengarahan program	-	-	-
7	Action Learning	-	-	-
TOTAL JP			18 JP	
LAMA WAKTU UJIAN Pre Test : 30 Menit Post Test : 30 Menit				
DILAKSANAKAN DALAM			3 hari	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM				
Bimtek kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
PERSYARATAN PESERTA				
Administrasi				
1. ASN Pemda yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas pembiayaan pembangunan daerah dalam dua tahun terakhir				
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek.				
Kompetensi				
1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek				
2. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet				
KUALIFIKASI PENGAJAR				
1. Kualifikasi Umum				
a. Profesional/praktisi di bidangnya				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
2. Kualifikasi Khusus				
a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti Coaching of Coaches				

3. Lain-lain:

Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)

REKOMENDASI PENGAJAR

No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD	Akademisi
2	Pinjaman Daerah	Akademisi/Praktisi
3	Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya	Akademisi/Praktisi
4	Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah	Akademisi/Praktisi
5	Manajemen Pengelolaan Utang	Akademisi/Praktisi
6	<i>Current issue</i>	Praktisi/(K/L)

Catatan:

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

BENTUK EVALUASI

Evaluasi Level 1

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.

Evaluasi Level 2

Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek

Evaluasi Level 3

Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.

Evaluasi Level 4

-

FASILITAS

1. Ruang pembelajaran daring melalui *MS Teams*
2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Bimtek keuda kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis dan keterampilan dasar dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik penganggaran yang berlaku.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Arah pembangunan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas harus menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara integratif dan tidak semata difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan publik di daerah atau peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, tapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN Pemda di bidang perencanaan dan penganggaran, DJPK bekerja sama dengan <i>Center of Excellence</i> menyelenggarakan bimtek keuangan daerah jalur daring kelas perencanaan dan penganggaran daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan daerah maupun penyusun anggaran dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel.
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam perencanaan dan/atau penganggaran serta OPD lainnya yang terkait.
MODEL PEMBELAJARAN	
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NON TATAP MUKA (NTM) ☐ <i>e-learning</i> ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas perencanaan penganggaran daerah, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Memahami Penganggaran Daerah 3. Memahami <i>Overview</i> APBD 4. Memahami Praktik Penyusunan Anggaran 5. Mengetahui <i>E-Government</i>	

KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.1. Memahami Pengertian dan Konsep Pembangunan Daerah
 - 1.2. Memahami Pengertian dan Konsep Perencanaan Pembangunan
 - 1.3. Memahami Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional (sinkronisasi dokumen RTRW, KLHS, dan SPM)
 - 1.4. Memahami Sistem perencanaan / RPJMD (program prioritas daerah, RKPD)
 - 1.5. Memahami Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (pohon kinerja)
 - 1.6. Memahami Penyusunan Renstra, Renja OPD
 - 1.7. Memahami KUA dan PPAS
2. Memahami Penganggaran Daerah
 - 2.1. Memahami Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Serta Siklus Anggaran
 - 2.2. Memahami Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF)
 - 2.3. Memahami *Value for Money*, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
 - 2.4. Memahami Standar Satuan Harga
 - 2.5. Memahami Analisis Standar Belanja
 - 2.6. Melakukan Simulasi Penyusunan Analisis Standar Belanja
3. Memahami Overview APBD
 - 3.1. Memahami Definisi/Pengertian APBD
 - 3.2. Memahami Struktur APBD (Permendagri terkait penyusunan APBD tahun berjalan, Kepmendagri 050_5889/2021)
 - 3.3. Memahami Gambaran Umum Pendapatan Daerah
 - 3.4. Memahami Gambaran Umum Belanja
 - 3.5. Memahami Gambaran Umum Pembiayaan Daerah
4. Menerapkan Praktik Penyusunan Anggaran
 - 4.1. Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Teori dan Latihan) (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dana bergulir)
 - 4.2. Melakukan Penyusunan Angka Dasar/ Based line dan inisiatif baru dalam KPJMD
5. Menerapkan *E-Government*
 - 5.1. Memahami Pengertian dan Ruang Lingkup *E-Government*
 - 5.2. Memahami *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-Controlling*
 - 5.3. Melakukan Praktik *E-Government: E-Planning, E-Budgeting, dan E-Controlling*

LAMA BIMTEK DAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1.	Materi pokok	1. Perencanaan Pembangunan Daerah	5	2
		2. Penganggaran Daerah	5	3
		3. Overview APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	2	1
		4. Praktik Penyusunan Anggaran	4	4
2.	Materi penunjang	-		
3.	Ceramah	<i>Current issue</i>	2	5
5.	Outbound	-		

6.	Pengarahannya program	-		
7.	Action Learning	-		
TOTAL JP			18	
LAMA WAKTU UJIAN		Pre test: 30 menit Post test: 30 menit		
DILAKSANAKAN DALAM			3 hari	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM				
Bimtek kelas perencanaan dan penganggaran daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
PERSYARATAN PESERTA				
Administrasi				
1. ASN di lingkungan unit pengelola keuangan daerah dan unit perencanaan daerah dan OPD lainnya yang terkait				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas perencanaan dan penganggaran daerah dalam dua tahun terakhir				
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek.				
Kompetensi				
1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek				
2. Memahami tugas dan fungsi terkait perencanaan dan penganggaran daerah				
3. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet				
KUALIFIKASI PENGAJAR				
1. Kualifikasi Umum				
a. Profesional/praktisi di bidangnya				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
2. Kualifikasi Khusus				
a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti Coaching of Coaches				
3. Lain-lain:				
Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)				
REKOMENDASI PENGAJAR				
No.	Materi		Rekomendasi Pengajar	
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah		Akademisi	
2.	Penganggaran Daerah		Akademisi	
3.	Overview APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan		Akademisi	
4.	Praktik Penyusunan Anggaran		Akademisi/praktisi	
5.	Current issue		Kemenkeu/akademisi	
BENTUK EVALUASI				
Evaluasi Level 1				
Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK maupun link khusus.				

Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek
Evaluasi Level 3 Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.
Evaluasi Level 4 -
FASILITAS
1. Ruang pembelajaran daring melalui <i>MS Teams</i> 2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi 3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk <i>softcopy</i> yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan 4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan 5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penagihan / Juru Sita Pajak Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Bimtek keuda kelas Penagihan/Juru Sita Pajak Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis penagihan pajak daerah.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas handal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah sangat diperlukan guna menggali berbagai potensi penerimaan yang terdapat di suatu daerah. Kegiatan penagihan pajak daerah memiliki peranan yang vital dalam penegakan hukum perpajakan daerah karena kegiatan ini dapat memastikan dan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Memperhatikan fenomena kepatuhan dan perilaku wajib pajak yang kompleks dan beragam serta masih minimnya tenaga juru sita yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penagihan pajak daerah sehingga para aparat pemeriksa pajak daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah.
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama di bidang penagihan pajak daerah, yang diproyeksikan untuk menjadi juru sita.
MODEL PEMBELAJARAN	
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NONTATAP MUKA ☐ <i>e-learning</i> ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penagihan pajak daerah, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah 2. Memahami pelaksanaan penagihan pajak daerah secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Memahami kegiatan administrasi penagihan pajak daerah 4. Memahami prosedur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah 5. Memahami aspek hukum dalam penagihan pajak daerah 6. Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah	

KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah
 - 1.1 Memahami KUPD dan istilah dalam administrasi perpajakan daerah
 - 1.2 Memahami penagihan pasif
 - 1.3 Memahami profile WPD (utang pajak (prioritas penagihan), rekam jejak pembayaran, kepemilikan aset)
2. Memahami pelaksanaan penagihan pajak daerah secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 2.1 Memahami substansi peraturan terkait penagihan pajak daerah
 - 2.2 Memahami fungsi-fungsi yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak daerah (kondisi dilapangan)
3. Memahami kegiatan administrasi penagihan pajak daerah
 - 3.1 Memahami dokumen dan formulir terkait penagihan pajak daerah
 - 3.2 Memahami fungsi dan kegunaan dokumen-dokumen terkait penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan (digitalisasi penagihan pajak daerah)
4. Memahami prosedur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah (digitalisasi penagihan pajak daerah)
 - 4.1 Memahami langkah-langkah teknis, sistem, dan prosedur pelaksanaan penagihan (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan)
5. Memahami aspek hukum dalam penagihan pajak daerah
 - 5.1 Memahami konsekuensi dan risiko hukum atas pelaksanaan penagihan pajak daerah
 - 5.2 Memahami dasar-dasar hukum (administrasi, perdata dan pidana) dalam proses penagihan pajak daerah
 - 5.3 Memahami analisis penanganan perkara penagihan dan perbankan
6. Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah
 - 6.1 Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah
 - 6.2 Memahami penerapan strategi dan model penagihan pajak daerah dalam beberapa situasi dan kondisi

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	1. Overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah	2	1
		2. Pelaksanaan penagihan pajak daerah	2	2
		3. Administrasi penagihan pajak daerah	2	3
		4. Prosedur penagihan pajak daerah	4	4
		5. Aspek hukum penagihan pajak dengan surat paksa	2	5
		6. Strategi dan model penagihan pajak daerah	4	6
2	Materi penunjang			
3	<i>Current issue</i>	Contoh kasus penagihan dan upaya penyelesaiannya	2	7
4	PKL/ studi lapangan	-	-	
5	Outbound	-	-	
6	MFD	-	-	

7	Pengarahannya program	-	-	
8	Action Learning	-	-	
TOTAL JP			18	
LAMA WAKTU UJIAN		Pre test : 30 menit Post test: 30 menit		
DILAKSANAKAN DALAM			3 hari	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM				
Bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
PERSYARATAN PESERTA				
Administrasi				
1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek penagihan pajak daerah dalam dua tahun terakhir				
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing				
Kompetensi				
1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek				
2. Memahami tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang milik daerah				
3. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet				
KUALIFIKASI PENGAJAR				
1. Kualifikasi Umum				
a. Pendidikan minimum S-1				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
2. Kualifikasi Khusus				
a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti Coaching of Coaches				
REKOMENDASI PENGAJAR				
No.	Materi		Rekomendasi Pengajar	
1	Overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah		Akademisi	
2	Pelaksanaan penagihan pajak daerah		Akademisi	
3	Administrasi penagihan pajak daerah		Akademisi	
4	Prosedur penagihan pajak daerah		Akademisi	
5	Aspek hukum penagihan pajak dengan surat paksa		Akademisi	
6	Strategi dan model penagihan pajak daerah		Akademisi/Praktisi	
7	Contoh kasus penagihan dan upaya penyelesaiannya		Praktisi/Pemda percontohan	
Catatan:				
Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.				

BENTUK EVALUASI	
Evaluasi Level 1	Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.
Evaluasi Level 2	Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek
Evaluasi Level 3	Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.
Evaluasi Level 4	-
FASILITAS	
1. Ruang pembelajaran daring melalui <i>MS Teams</i> 2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi 3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk <i>softcopy</i> yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan 4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan 5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek	

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Bimbingan teknis keuangan daerah (bimtek keuda) kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, wawasan praktis, dan keterampilan teknis terkait penggalian potensi PDRD.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas andal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung produktivitas kinerja pemungutan pajak daerah. Pengetahuan dan keterampilan dalam penggalian potensi PDRD sangat diperlukan guna mendukung penyusunan strategi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan metode maupun teknik saintifik. Memperhatikan urgensi penggalian potensi PDRD terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penggalian potensi PDRD sehingga para aparat pengelola pendapatan daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat merumuskan strategi optimalisasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur, adil, dan objektif dari aktivitas ekonomi di daerahnya.
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.
MODEL PEMBELAJARAN	
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NON TATAP MUKA (NTM) ☐ <i>e-learning</i> ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang

STANDAR KOMPETENSI
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penggalan potensi PDRD, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami <i>overview</i> pengantar penggalan potensi PDRD 2. Memahami teknis penggalan potensi PBB-P2 dan BPHTB 3. Memahami penggalan potensi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir) 4. Memahami penggalan potensi retribusi daerah 5. Memahami penggalan potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat
KOMPETENSI DASAR
Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi 1. Memahami <i>overview</i> pengantar penggalan potensi PDRD 1.1 Memahami latar belakang dilakukan penggalan potensi PDRD 1.2 Memahami sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 1.3 Memahami pendekatan makro dan mikro dalam menghitung potensi pajak daerah 1.4 Memahami prinsip dalam penentuan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 1.5 Memahami pembangunan basis data perpajakan daerah 1.6 Memahami profiling dan modernisasi administrasi perpajakan daerah 1.7 Memahami opsen pajak 2. Memahami teknis penggalan potensi PBB-P2 dan BPHTB 2.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB 2.2. Memahami pendataan, penilaian, dan penetapan PBB-P2 serta penelitian dan pemeriksaan BPHTB 2.3. Memahami analisis pengembangan potensi PBB-P2 dan BPHTB 3. Memahami penggalan potensi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir) 3.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir) 3.2. Memahami pendataan, penyusunan profil dan pemeriksaan pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir) 3.3. Memahami analisis pengembangan potensi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir) 4. Memahami penggalan potensi retribusi daerah 4.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu 4.2. Memahami pelaksanaan dan masalah-masalah perhitungan potensi yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah 4.3. Memahami modernisasi administrasi retribusi daerah 4.4. Memahami analisis pengembangan potensi retribusi daerah 5. Memahami penggalan potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat 5.1. Memahami penghitungan PPh dan PPN secara umum 5.2. Memahami data penghasilan dan peredaran usaha wajib pajak pusat 5.3. Memahami analisis pengembangan potensi pajak daerah melalui rekonsiliasi data pajak pusat dengan basis pajak daerah 5.3.1 Memahami data identitas wajib pajak 5.3.2 Memahami data perizinan 5.3.3 Memahami penghasilan dan peredaran usaha 5.3.4 Memahami data lainnya
LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	1. <i>Overview</i> pengantar penggalian potensi PDRD	2	1
		2. Teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB	4	2
		3. Penggalian potensi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir)	4	3
		4. Penggalian potensi retribusi daerah	4	4
		5. Penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat	2	5
2	Ceramah	<i>Current issue / knowledge sharing</i>	2	6
3	PKL/ studi lapangan	-	-	-
4	Observasi	-	-	-
5	Pengarahan program	-	-	-
6	<i>Action Learning</i>	-	-	-
TOTAL JP			18 JP	
LAMA WAKTU UJIAN <i>Pre Test</i> : 30 Menit <i>Post Test</i> : 30 Menit				
DILAKSANAKAN DALAM			3 hari	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM				
Bimtek kelas penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
PERSYARATAN PESERTA				
Administrasi				
1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas penggalian potensi PDRD dalam dua tahun terakhir				
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek				
Kompetensi				
1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek				
2. Memahami tugas dan fungsi terkait potensi pajak daerah dan retribusi daerah				
3. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet				
KUALIFIKASI PENGAJAR				
1. Kualifikasi Umum				
a. Profesional/praktisi di bidangnya				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
2. Kualifikasi Khusus				
a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i>				
3. Lain-lain:				
Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)				

REKOMENDASI PENGAJAR		
No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Overview pengantar penggalian potensi PDRD	Akademisi
2	Teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB	Akademisi/praktisi
3	Penggalian potensi pajak barang dan jasa tertentu (hotel, restoran, hiburan dan parkir)	Akademisi/praktisi
4	Penggalian potensi retribusi daerah	Akademisi
5	Penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat	Praktisi pemda
Catatan: Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.		
BENTUK EVALUASI		
Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website <i>e-learning</i> DJPK maupun link khusus.		
Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek		
Evaluasi Level 3 Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.		
Evaluasi Level 4 -		
FASILITAS		
1. Ruang pembelajaran daring melalui <i>MS Teams</i> 2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi 3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk <i>softcopy</i> yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan 4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan 5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek		

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

NAMA PROGRAM	
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM Bimtek keuda kelas pemeriksaan pajak daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis pemeriksaan pajak daerah. Program bimtek ini diselenggarakan dengan metode pembelajaran jarak jauh secara daring.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas handal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah sangat diperlukan guna menggali berbagai potensi penerimaan yang terdapat di suatu daerah. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah memiliki peranan yang vital dalam penggalan potensi penerimaan pajak daerah karena kegiatan ini dapat memastikan dan mengamankan potensi-potensi penerimaan yang ada. Memperhatikan kondisi pemeriksaan yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah sehingga para aparat pemeriksa pajak daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas pemeriksaan secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
	SASARAN (TARGET LEARNERS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama di bidang pemeriksaan pajak daerah, yang diproyeksikan untuk menjadi tenaga pemeriksa.
	MODEL PEMBELAJARAN
	☐ TATAP MUKA (TM) ☒ NON TATAP MUKA (NTM) ☐ <i>e-learning</i> ☐ Bimbingan di tempat kerja ☒ Pelatihan jarak jauh ☐ Magang
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas pemeriksaan pajak daerah, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami <i>overview</i> Pemeriksaan Pajak Daerah 2. Memahami aspek hukum dalam pemeriksaan pajak daerah 3. Memahami metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah 4. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah	

5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah				
KOMPETENSI DASAR				
Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi				
1. Memahami <i>overview</i> pemeriksaan pajak daerah 1.1 memahami konsep pajak daerah dan KUPD 1.2 memahami ketentuan dan jenis pajak daerah sesuai UU No.1 Tahun 2022 dan peraturan turunannya. 1.3 memahami gambaran umum pembukuan dan pemeriksaan 2. Memahami aspek hukum dalam pemeriksaan pajak daerah 2.1 memahami hak dan kewajiban wajib pajak daerah 2.2 memahami kewenangan dan kewajiban pemeriksa pajak daerah 2.3 memahami rahasia jabatan, wakil, dan kuasa wajib pajak daerah 2.4 memahami aspek hukum administrasi 2.5 memahami aspek pidana 3. Memahami metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah 3.1 memahami tahapan pemeriksaan pajak daerah (observasi lapangan) 3.2 memahami kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan pemeriksaan 3.3 memahami metode pemeriksaan 3.4 memahami teknik dan prosedur pemeriksaan 4. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah 4.1 melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan 4.2 melaksanakan penyelesaian pemeriksaan 5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah 5.1. menyusun kertas kerja pemeriksaan pajak daerah 5.2. menyusun laporan hasil pemeriksaan pajak daerah				
LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI				
No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	1. Overview pemeriksaan pajak daerah	2	1
		2. Aspek Hukum dalam pemeriksaan pajak daerah	2	2
		3. Metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah	3	3
		4. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	4	4
		5. Kertas Kerja dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)	5	5
2	Materi penunjang	-	-	-
3	Ceramah	<i>Current issue / knowledge sharing</i>	2	6
4	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5	Observasi	-	-	-
6	Pengarahan program	-	-	-
7	<i>Action Learning</i>	-	-	-
TOTAL JP			18 JP	

LAMA WAKTU UJIAN <i>Pre Test</i> : 30 Menit <i>Post Test</i> : 30 Menit		60 Menit
DILAKSANAKAN DALAM		3 hari
JENIS DAN JENJANG PROGRAM		
Bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar		
PERSYARATAN PESERTA		
Administrasi 1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah 2. Usia maksimum 50 tahun 3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah dalam dua tahun terakhir 4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek Kompetensi 1. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimtek 2. Memahami tugas dan fungsi terkait pemeriksaan pajak daerah 3. Mampu menggunakan laptop atau sarana pendukung lainnya yang terkoneksi dengan internet		
KUALIFIKASI PENGAJAR		
1. Kualifikasi Umum a. Profesional/praktisi di bidangnya b. Memiliki pengalaman mengajar c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal 2. Kualifikasi Khusus a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i> 3. Lain-lain: Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)		
REKOMENDASI PENGAJAR		
No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Overview Pemeriksaan Pajak Daerah	Akademisi
2	Aspek Hukum dalam pemeriksaan pajak daerah	Akademisi
3	Metode, Teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah	Akademisi
4	Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Akademisi/Praktisi
5	Kertas Kerja dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)	Akademisi/Praktisi
6	<i>Current issue</i>	Praktisi/Pemda percontohan
Catatan: Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.		
BENTUK EVALUASI		

Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website <i>e-learning</i> DJPK maupun link khusus.
Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek
Evaluasi Level 3 Evaluasi pasca bimtek yang dilakukan kepada atasan langsung maupun teman kerja peserta, untuk mengetahui perubahan perilaku dan kinerja peserta setelah mengikuti bimtek dalam pelaksanaan tugas pada unit kerjanya sesuai dengan materi yang telah diterima.
Evaluasi Level 4 -
FASILITAS
1. Ruang pembelajaran daring melalui <i>MS Teams</i> 2. Souvenir bimtek berupa voucher pulsa sebagai penggantian biaya komunikasi 3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk <i>softcopy</i> yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan 4. Pendampingan dari panitia dan pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan 5. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek

Direktur Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

